

PEMILU DAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA: Menanti Kebangkitan Partai Politik Islam di Tahun 2019

Oleh:

Kiki Mikail

Program Studi Politik Islam

Fakultas Adab dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstracts:

Indonesian democratic transition in the post-reform era has change the feature of Indonesia's politics. During the New Order, the power of Islam politics had been experiencing fluctuations and dynamics. In the early New Order, Islam was marginalized from the state. In the meantime Islam found many difficulties in evolving social political ideas because of the repressive new order regime. But the most interesting thing of Indonesian political is the dominance of nationalist political parties in every election even though the majority of Indonesian people are Muslim. However, its interesting to look forward how is the oppurtunity of islamic political parties in 2019 election?

Keywords: *Islamic Political Party, legislative election, President election, democracy*

A. Pendahuluan

Indonesia akan memulai babak baru dalam kehidupan berdemokrasinya. Setelah Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden dan wakil presiden tahun 2014 dilakukan secara demokratis, tertib dan damai, kini masyarakat Indonesia menantikan kerja-kerja yang brilian dan pro rakyat dari pemimpin-pemimpin yang telah mereka pilih dalam pemilu. Berbeda dengan hasil Pemilu tahun 2009 lalu, kursi parlemen dikuasai oleh Partai Demokrat

dengan perolehan suara sekitar 20% suara nasional,¹ di tahun 2014 ini. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang selama 10 tahun menjadi partai oposisi, kini menguasai kursi parlemen dengan perolehan suara secara nasional sebesar 18,95 persen.²

Sementara itu, dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diusung oleh Partai PDI-P, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia memperoleh suara sebesar 70.997.833 suara atau 53,15 persen suara nasional. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung oleh partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera memperoleh suara sebesar 62. 576.444 suara atau 46,85 persen. Total jumlah pemilih yang sah maupun tidak sah pada pemilu 2014 sebesar 134.953.967 suara secara nasional.³ Dengan terpilihnya Joko Widodo menjadi Presiden ketujuh Indonesia, yang sebelumnya menjabat Walikota Solo dan Gubernur Jakarta, menjadi pertanyaan penting, apakah Joko Widodo mampu menjawab persoalan-persoalan krusial menyangkut kehidupan khalayak banyak dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik atau malah justeru sebaliknya?

B. Transisi dari Rezim Suharto menuju Reformasi

Demokrasi di Indonesia sejatinya mulai dirasakan oleh masyarakat Indonesia setelah runtuhnya rezim diktator Suharto.

¹<http://partai.info/pemilu2009/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2014.

²Lihat Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2014, dalam www.nasional.kompas.com. Diakses pada tanggal 10 September 2014.

³KPU tetapkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, www.kpu.go.id. Diakses pada tanggal 10 September 2014.

Rezim Suharto runtuh pada Mei 1998 setelah hilangnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap dirinya.⁴ Soeharto telah menjadi presiden Indonesia selamakurun lebih 32 tahun. Sebelum lengser, Indonesia mengalami krisis politik dan ekonomi yang memaksa Suharto harus turun dari kekuasaannya. Pemilu yang diselenggarakan di era rezim Suharto antara lain pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 selalu di menangi oleh Partai Golongan Karya (Golkar) yang dikuasai oleh Suharto.

Dilihat dari sisi sejarah, sejak dideklarasikannya kemerdekaan Indonesia hingga saat ini, sistem multipartai merupakan sesuatu yang natural di dalam masyarakat Indonesia. Tercatat dalam sejarah politik Indonesia pemilu pertama kali yang paling demokratis terjadi adalah pada tahun 1955. Sebagai konsekuensi dari dianutnya sistem multipartai, pemilu tahun 1955 melahirkan 172 partai dan organisasi. Tetapi, dalam pemilu 1955 hanya empat partai politik yang memiliki suara dominan, yaitu: [1] PNI sebanyak 22 persen, [2] Masyumi 20 persen, [3] Nahdhatul Ulama 18 persen, dan [4] PKI 16 persen suara.⁵

Partai-partai yang memperoleh suara itu juga mencerminkan kuatnya basis ideologi dari masing-masing partai dan organisasi. Partai Nasional Indonesia (PNI) mendapat dukungan kuat dari pengikut ideologi Nasionalis, Masyumi memperoleh dukungan kuat dari para pemilih Islam modern, Nahdhatul Ulama mendapat dukungan kuat dari kelompok pemilih Islam tradisional, dan PKI memperoleh dukungan dari para pengikut ideologi komunis baik yang ada di Jawa maupun di luar Pulau Jawa.

⁴Siddharth Chandra and Douglas Kammen, "Generating Reforms and Reforming Generations: Military Politics in Indonesia's Transition to Democracy", in *World Politics*, Vol. 55, No. 1, (2002).

⁵Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Paska Orde Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 67.

Yang menarik untuk dicermati dalam pemilihan umum tahun 1955 adalah Nahdhatul Ulama. Nahdhatul Ulama, meskipun tidak berbentuk partai politik, tetapi dapat mengikuti Pemilihan Umum tahun 1955 yang akhirnya mendapat suara terbesar ketiga setelah PNI dan Masyumi. Nahdhatul Ulama merupakan organisasi keislaman yang didirikan pada saat Indonesia berada di bawah pemerintahan Kolonial Belanda. NU didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Salah satu aspek paling esensial dari Nahdhatul Ulama adalah ideologi yang dianutnya, yakni ideologi *Ahlussunnah wal jama'ah*. Ideologi ini dicantumkan secara jelas dalam platform organisasi tersebut.⁶

Namun, pada tahun 1975, ada peraturan pemerintah yang harus menyederhanakan partai politik. Empat partai politik Islam, yaitu: Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Sarikat Islam, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Nahdhatul Ulama harus bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara itu, lima partai lain, yaitu: Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia, Partai Murba, dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Dengan lahirnya undang-undang no 3 tahun 1975 tentang partai politik, akhirnya Nahdhatul Ulama harus bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan.⁷ Akibat dari penyederhanaan terhadap sistem partai di Indonesia, dari tahun 1977 hingga 1997, hanya terdapat tiga partai politik peserta Pemilu, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Golkar yang dikuasai oleh penguasa saat itu yaitu

⁶Suaidi Asyari, *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah*, (Yogyakarta: LKiS, 2009), h. 94-101.

⁷*Ibid.*, h. 123.

Presiden Suharto.

C. Kemunculan Partai Politik Baru di Era Reformasi

Pemilu 1999 merupakan Pemilihan Umum demokratis pertama setelah Pemilu 1955. Untuk melaksanakan Pemilu 1999, terlebih dahulu dipersiapkan sejumlah undang-undang sebagai landasan baru proses pemilu. Undang-undang tersebut antara lain memunculkan ratusan partai-partai politik sebagai wujud demokrasi.

Setelah diseleksi dengan persyaratan ketat, jumlah partai politik yang awalnya ratusan menjadi 48 partai. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu pada tahun 1999 masih diisi wakil-wakil partai politik dan dari kalangan profesional. Namun, pada tahun 2004 hingga sekarang, Komisi Pemilihan Umum hanya boleh diisi oleh kalangan profesional dan independen, tidak boleh ada keterikatan dengan partai politik dan pemerintahan, sehingga terlihat bahwa pemilu di Indonesia sekarang semakin independen dan demokratis.⁸

Nilai-nilai dasar demokrasi yang telah dibangun di era Habibie telah memberikan sumbangan cukup signifikan dalam proses demokratisasi di Indonesia. Ide dasar pertama adalah bagaimana dapat menciptakan good governance, salah satunya adalah bagaimana dapat membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi rakyat.

B.J. Habibie yang menjadi presiden ketiga walaupun memimpin bangsa Indonesia dalam kurun waktu yang relatif

⁸Pemilihan Umum sebelum era reformasi di Indonesia diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

singkat, yaitu 512 hari,⁹ namun apa yang telah dilakukannya, telah membawa Indonesia ke alam demokrasi yang nyata. Setelah menyatakan tidak akan mencalonkan diri pada pemilu 1999,¹⁰ Habibie membentuk Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum. Pada Pemilihan Umum tahun 1999, walaupun partai politik banyak bermunculan, tapi dikarenakan persyaratan yang ketat, akhirnya hanya 48 partai politik yang ikut dalam Pemilihan Umum. Namun, dari ke 48 partai politik tersebut, hanya ada lima partai politik yang memperoleh suara signifikan. Adapun kelima partai politik tersebut adalah:¹¹

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) dengan perolehan suara 33,74 persen
2. Partai Golkar dengan perolehan suara 22,44 persen
3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan perolehan suara 10,71 persen
4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perolehan suara 12,61 persen
5. Partai Amanat Nasional (PAN) dengan perolehan suara 7,12 persen

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memenangkan Pemilihan Legislatif pada tahun 1999, sepakat untuk mencalonkan Megawati Soekarno Putri menjadi calon presiden. Dengan kemenangan partainya, Megawati dan para pendukungnya memperkirakan akan memenangkan pemilihan presiden pada Sidang Umum MPR. Namun, PDI-P tidak memiliki kursi mayoritas penuh di legislatif, sehingga membentuk aliansi dengan PKB. Pada

⁹Bacharuddin Jusuf Habibie, *Detik-detik Yang Menentukan*, (Jakarta: THC Mandiri, 2006), h. 472-506.

¹⁰*Harian Kompas*, 21 Oktober 1999.

¹¹KPU.go.id, Pemilu 1999. Diakses pada tanggal 10 Maret 2014

Juli tahun 1999, [Amien Rais](#) pendiri Partai Amanat Nasional membentuk Poros Tengah,¹² koalisi partai-partai Muslim. Poros Tengah mulai menggulirkan ide pencalonan Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Setelah itu, komitmen PKB pun terhadap pencalonan Megawati mulai berubah.

Pada 7 Oktober 1999, Poros Tengah secara resmi menyatakan dukungan kepada Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden Indonesia keempat. Beberapa tokoh pun, seperti: Akbar Tanjung - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan Amien Rais -Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat- menyatakan akan mendukung pencalonan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden. Pada tanggal 20 Oktober 1999, MPR bersidang dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid yang didukung oleh Poros Tengah kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia dengan perolehan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara.¹³ Hasil pemilihan presiden ini tentunya menjadi pukulan keras bagi PDI-P yang memenangkan pemilihan legislatif tahun 1999.

Pada akhir tahun 2000, terdapat banyak elit politik yang kecewa dengan sikap dan kebijakan politik Abdurrahman Wahid. Sikapnya yang aneh yang sering menggonta-ganti kabinetnya serta sering bepergian ke luar negeri, membuat sejumlah elit politik mulai tidak suka dengan sikapnya. Selain itu, Abdurrahman Wahid diindikasikan berusaha membuka hubungan dengan Israel, yang menyebabkan kemarahan pada kelompok Muslim

¹²Poros tengah adalah koalisi partai-partai politik Islam, seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (sekarang Partai Keadilan Sejahtera/ PKS), Partai Kebangkitan Umat (PKU), dan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Greg Barton, *The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, Jakarta: LKiS, 2002), h. 275.

¹³J.F. Conceicao, *Indonesia's Six Years of Living Dangerously*, (Singapore: Horizon Books, 2005), h. 9.

Indonesia. Hubungan Abdurrahman Wahid dengan Tentara Nasional Indonesia pun pada tahun tersebut semakin memburuk. Tentara Nasional Indonesia dituding oleh Abdurrahman tidak patuh terhadap pemerintahnya. Melihat parlemen akan melakukan tindakan terhadap sikapnya yang aneh, Abdurrahman Wahid memerintahkan untuk membubarkan DPR. Namun, Niatnya itu ditanggapi keras oleh DPR dengan mengadakan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tanggal 23 Juli 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan sidang istimewa dan memutuskan untuk menurunkan Abdurrahman Wahid dari kursi presiden dan menunjuk Megawati Sukarno Putri menjadi presiden.¹⁴

Dengan terpilihnya Megawati Sukarno Putri dari Partai PDI-P yang sebelumnya berhasil meraih suara terbesar pada pileg 1999, diharapkan keadaan politik di Indonesia mulai stabil, karena Megawati didukung oleh hampir 50 persen anggota DPR. Di era Megawati, lahirlah Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden yang mengamanatkan untuk memilih presiden secara langsung oleh rakyat, karena pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan amanah reformasi. Meskipun pada akhirnya undang undang inilah yang menjegal langkah Megawati untuk merebut kembali kursi presiden, bahkan dia harus mengalami kekalahan sebanyak dua kali, yaitu pada Pemilihan Presiden tahun 2004 dan 2009, tetapi harus diakui bahwa Megawati memiliki saham besar terhadap terlaksananya pemilihan presiden secara langsung dalam sejarah Indonesia.

¹⁴Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa : Kasus Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2002).

D. Pemilu 2004 dan Awal Pemilihan Presiden Secara Langsung

Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama di mana masyarakat Indonesia dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden pilihan mereka. Pada tahun ini, pemilu Indonesia mencatat sejarah penting dengan berhasil diberlakukannya system proporsional dengan daftar calon terbuka. Artinya, pemilu 2004 pemilih tidak lagi hanya memilih partainya saja, melainkan dapat memilih calonnya langsung yang sesuai dengan pilihan mereka. Selain itu, amandemen keempat Undang-undang Dasar pada tahun 2002, tentang Pemilihan [Presiden](#) dan [Wakil Presiden](#), yang semula dilakukan oleh [MPR](#), mengatur pemilihan presiden untuk dilakukan dipilih langsung oleh rakyat. Pada pemilu kali ini, ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia sehingga melahirkan 24 partai politik yang pada gilirannya turut berpartisipasi dalam pemilihan umum tahun 2004.

Pada pemilu 2004, fenomena pemilu 1955 dan 1999 terulang kembali. Konsentrasi perolehan suara lebih banyak menyebar ke partai-partai tertentu saja. Meskipun demikian, kalau dibandingkan dengan pemilu 1955 dan 1999, jumlah partai politik yang memperoleh dukungan suara yang signifikan lebih banyak jumlahnya, yaitu tujuh partai. Di samping lima partai yang ikut pemilu 1999, pemilu 2004 menghasilkan dua partai tambahan yang memperoleh suara besar, yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. ¹⁵Adapun tujuh partai politik yang memperoleh suara signifikan adalah sebagai berikut:¹⁶

¹⁵Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Paska Orde Baru*, h. 69

¹⁶ Kpu.go.id.

1. Golkar dengan perolehan suara 21,6 persen
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) dengan perolehan suara 18,5 persen
3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perolehan suara 10,6 persen
4. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan perolehan suara 8,2 persen
5. Partai Demokrat dengan perolehan suara 7,5 persen
6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan perolehan suara 7,3 persen
7. Partai Amanat Nasional (PAN) 6,4 persen.

Munculnya partai-partai politik baru yang memperoleh suara yang cukup signifikan pada pemilu 2004, tidak terlepas dari munculnya para pemilih yang mulai kritis. Para pemilih dari muslim perkotaan yang kecewa terhadap politisi periode 1999-2004, khususnya politisi dari partai politik Islam yang kurang mendengarkan aspirasi masyarakat Islam, menyalurkan suaranya kepada Partai Keadilan Sejahtera yang dianggap memiliki visi misi yang jelas dalam membawa citra Islam yang lebih bersih dan modern. Sedangkan Partai Demokrat yang didirikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, menurut pandangan masyarakat nasionalis, merupakan pilihan alternatif untuk menggantikan posisi Megawati sebagai presiden, maka dengan perolehan suara yang cukup signifikan terhadap Partai Demokrat, masyarakat berharap Susilo Bambang Yudhoyono dapat mencalonkan diri menjadi presiden melalui Partai Demokrat dan memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik.

Untuk memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, partai politik melakukan koalisi dengan partai

lainnya. Partai Demokrat yang mengusung Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presidennya, dengan perolehan suara 7,5 persen dalam pemilu legislatif 2004 melakukan koalisi dengan Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Sedangkan partai Golkar, partai pemenang pemilu legislatif 2004 melakukan terobosan dengan melakukan konvensi untuk menentukan calon presiden dari partai tersebut, dengan harapan masyarakat semakin simpatik terhadap partai tersebut. Dalam konvensi yang berjalan, akhirnya terpilihlah Wiranto mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia yang mengalahkan kandidat lain yaitu, Abu Rizal Bakri, Surya Paloh, Prabowo Subianto, dan Akbar Tanjung yang saat itu menduduki jabatan sebagai ketua umum partai Golkar. Sehingga Wiranto Resmi menjadi calon presiden dari partai Golkar pada pemilihan presiden 2004.¹⁷

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai nasionalis yang mengidentikkan dirinya sebagai partainya masyarakat kalangan bawah, yang dalam pemilu legislatif 2004 harus puas menempati posisi kedua setelah partai Golkar, tetap mencalonkan Megawati Soekarno Putri sebagai presidennya. Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan yang kecewa terhadap Megawati, mengusung Hamzah Haz yang sebelumnya menjadi wakil presiden di era Megawati Soekarno Putri.

Pemilihan presiden pada tahun 2004 sendiri dilakukan melalui dua putaran dikarenakan pada putaran pertama tidak ada satu pun kandidat yang melebihi suara dari 50 persen suara. Akhirnya, karena Undang undang mengatur apabila tidak ada satu pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50 persen suara

¹⁷<http://news.liputan6.com/read/76442/wiranto-menang-konvensi-golkar>

harus melalui dua putaran, kandidat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Sukarno Putri yang memperoleh suara 26,6 dan Susilo Bambang Yudhoyono yang memperoleh suara 33,6 persen¹⁸pada putaran pertama, harus maju ke putaran kedua.

Penting untuk dicatat bahwa dalam pemilihan presiden yang berlangsung selama dua putaran, sangat banyak pemilih tidak mendukung calon presiden yang diusung oleh partai yang mereka dukung pada pemilihan legislatif, tetapi malah beralih ke calon presiden lain. Hal ini mengindikasikan bahwa pemilih Indonesia sangat individualistis dalam pengambilan keputusan mereka dan tidak mau tunduk pada seruan tokoh manapun, termasuk tokoh agama dan politik yang ada di Indonesia.

Dalam pemilu putaran kedua yang berlangsung pada bulan September, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kallayang sebelumnya mereka berdua adalah menteri dalam Kabinet Presiden Megawati, keluar sebagai pemenang pemilihan presiden periode 2004-2009 dengan perolehan suara sebanyak 60,6 persen.¹⁹Mereka memenangi pemilihan di hampir setiap provinsi kecuali di Bali, Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Transisi kekuasaan dari Megawati kepada Susilo Bambang Yudhoyono berjalan damai. Dikarenakan dipilih langsung oleh rakyat, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla memiliki mandat rakyat yang paling kuat dari semua presiden dalam sejarah Indonesia.

E. Pemilu 2009 dan Naiknya Demokrat sebagai Partai Penguasa

Pemilu 2009 sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pemilu ini diikuti oleh 38 Partai politik nasional dan

¹⁸ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Jakarta: Serambi, 2008), h. 730

¹⁹ *Ibid.*, h. 731

enam partai lokal. Hasilnya, hanya sembilan partai yang memperoleh suara dominan. Dari sembilan partai ini, tujuh diantaranya adalah partai-partai yang sudah ikut dalam pemilu 2004. Sedangkan partai Gerindra yang didirikan Prabowo Subianto dan Partai Hanura yang didirikan oleh Wiranto adalah dua partai baru yang berhasil mengambil hati masyarakat Indonesia pada pemilu 2009. Sebagian partai-partai baru yang lainnya tidak memperoleh suara yang cukup berarti. Yang cukup mengejutkan adalah, naiknya suara Partai Demokrat pada Pemilu legislatif 2009. Partai Demokrat yang sebelumnya hanya memperoleh suara 7,5 persen, pada pemilu 2009 naik drastis dengan perolehan suara 20,85 persen. Hasil ini merupakan hasil yang sangat fantastis, dikarenakan Partai Demokrat merupakan partai yang baru berdiri.²⁰

Pengaruh Susilo Bambang Yudhoyono disinyalir mampu menaikkan suara Partai Demokrat. Dengan perolehan suara terbanyak, akhirnya Marzuki Ali sebagai sekretaris partai demokrat waktu itu terpilih menjadi ketua DPR RI periode 2009-2014. Catatan kesuksesan partai demokrat pada pemilu 2009 yang berhasil memenangi pemilihan legislatif dan presiden ini, ingin dilanjutkan pada pemilu 2014. Namun, Setelah kongres kedua partai demokrat pada tanggal 23 Mei 2010 di Bandung Jawa Barat,²¹ internal partai demokrat mulai terbelah menjadi dua. Anas Urbaningrum yang berhasil mengalahkan pesaingnya, Marzuki Ali dan Andi Malarangeng, terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2010-2015 dianggap mewakili kubu dari politisi junior. Sedangkan Marzuki Ali yang kalah dalam kongres, dianggap

²⁰Partai Demokrasi didirikan pada tanggal [9 September 2001](#) dan disahkan pada [27 Agustus 2003](#), http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrat.

²¹Antaraneews.com, Anas Urbaningrum terpilih jadi Ketua Umum Partai Demokrat, diakses pada tanggal 10 Maret 2014

representasi dari kubu politisi senior demokrat. Yang menarik adalah, Andi Malarangeng yang nota benenya mendapat restu dari Susilo Bambang Yudhoyono untuk maju dalam pemilihan ketua umum partai demokrat, harus kalah oleh Anas Urbaningrum yang berhasil meyakinkan kader demokrat hingga level daerah.

Pengalaman Anas Urbaningrum di bidang keorganisasian, khususnya ketika menjadi ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam, juga sebagai aktivis muda yang lantang menyuarakan reformasi di Indonesia, telah mengantarkannya ke pucuk kepemimpinan, dengan terpilihnya Anas sebagai ketua umum partai demokrat, partai yang berkuasa saat itu. Maka tahun 2014 diharapkan roda kepemimpinan di Indonesia akan diisi oleh tokoh-tokoh muda dan enerjik seperti Anas Urbaningrum dan yang lainnya.

Boediono yang terpilih menjadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan presiden 2014, semakin hari terlihat semakin tidak menonjol peranannya dalam pemerintahan. Seakan boediono adalah penghias dan pelengkap Susilo Bambang Yudhoyono. Disisi lain, Anas Urbaningrum yang terpilih menjadi ketua umum partai demokrat, berhasil mengkonsolidasikan kader partai demokrat yang ada di legislatif, sehingga peran Anas Urbaningrum dalam pemerintahan, khususnya di legislatif, lebih menonjol ketimbang Boediono yang menjadi wakil presiden waktu itu. Sehingga terkesan bahwa, Anas Urbaningrum adalah wakil dari Susilo Bambang Yudhoyono.

Memasuki tahun 2011, nama Anas Urbaningrum disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon presiden RI 2014 yang layak untuk diperhitungkan. Selain muda, berpengalaman dalam berorganisasi, dan dari kalangan santri, Anas Urbaningrum juga

memiliki darah keturunan Jawa, yang nota benanya presiden Indonesia selalu dari keturunan Jawa. Dengan modal sebagai ketua partai demokrat dan dari keturunan Jawa, Anas Urbaningrum di prediksi bisa melenggang menjadi presiden termuda pada tahun 2014.

Namun pada tanggal 7 Agustus 2011, bencana menimpa partai demokrat. Partai yang pada awal tahun 2009 selalu mengkampanyekan anti korupsi, bahkan iklan-iklan anti korupsi tersebut selalu menghiasi layar televisi, ternyata partai Demokrat dirundung kasus korupsi. Bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin pemegang dan pengelola keuangan partai demokrat ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi di Kolombia dikarenakan terlibat kasus korupsi wisma atlet.²² Tertangkapnya bendahara umum partai demokrat, merupakan awal musibah dan perpecahan di tubuh partai demokrat. Seakan tidak rela masuk penjara sendirian, Muhammad Nazarudin kemudian membawa sejumlah nama petinggi partai demokrat pada kasus korupsi wisma atlet dan kasus korupsi lainnya. Karena menurut Nazarudin, dia tidak sendirian melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut. Adapun nama-nama yang dibawa oleh Nazarudin ke Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai berikut :

1. Angelina Sondakh, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari partai demokrat yang terlibat kasus korupsi wisma atlet dan kasus korupsi lainnya yang kemudian ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 3 Pebruari 2012.²³

²²<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/239281-polri--nazaruddin-tersangkut-hukum-kolombia>, diakses pada tanggal 10 Maret 2014.

²³“Angelina Dimasukkan ke Rumah Tahanan KPK”, *Kompas*, 28 April 2012.

2. Andi Alfian Malarangeng, Menteri Pemuda dan Olah Raga Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2, sekretaris dewan pembina partai demokrat tersebut ditetapkan sebagai tersangka kasus Korupsi Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 6 Desember 2012. Andi Malarangeng yang saat itu sedang menduduki jabatan Menteri Pemuda dan Olah raga diduga menyalahgunakan wewenangnya sebagai menteri dan merugikan negara pada proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional di Hambalang, Jawa Barat.²⁴
3. Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat, yang menurutnya semenjak terpilihnya sebagai ketua partai demokrat, tidak disukai oleh politisi senior partai demokrat, ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus korupsi dengan menerima hadiah dalam proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional di Hambalang, Jawa Barat dan proyek-proyek lainnya pada tanggal 22 Pebruari 2013.²⁵

Selain keempat nama tersebut, beberapa nama politisi partai demokrat juga sudah dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Edi Baskoro, Anak bungsu dari Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat sebagai sekretaris partai Demokrat, sering disebut-sebut oleh tersangka lainnya terlibat dalam kasus korupsi yang telah merugikan negara hingga ratusan milyarrupiah. Namun, hingga saat ini, putra bungsu SBY tersebut belum pernah dipanggil oleh KPK sekalipun.

²⁴KPK Tetapkan Andi Mallarangeng Tersangka Hambalang, Kamis 6 Desember 2012, *www.kompas.com*.

²⁵“Anas Resmi Tersangka Kasus Suap”, Jum’at 22 Pebruari 2012, *www.tempo.co*.

Ditetapkannya Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus korupsi Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, menjadi preseden buruk bagi partai demokrat. Anas merasa kasusnya sudah dipolitisasi oleh para politisi senior demokrat yang tidak senang dengan kepemimpinannya. Sehari setelah ditetapkannya sebagai tersangka, Anas Urbaningrum melakukan konferensi pers di gedung Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan menyatakan mundur dari ketua umum partai tersebut.²⁶

Dalam pidato pengunduran dirinya, Anas Urbaningrum menuding bahwa kasus korupsi yang menimpa dirinya telah dipolitisasi. Bahkan, menurutnya, kehadirannya di partai demokrat, bagaikan bayi yang baru lahir yang tidak diharapkan kelahirannya, sehingga para politisi senior demokrat mengharapkan Anas Urbaningrum untuk segera keluar dari partai tersebut. Namun, Anas Urbaningrum tidak akan berhenti sampai disitu, menurutnya dia akan melakukan perlawanan terhadap kasus yang menimpa dirinya.

Partai Demokrat yang menurut hasil survei selalu menurun elektabilitasnya. Menuding Anas Urbaningrum sebagai faktor penyebab utama menurunnya elektabilitas partai tersebut. Dengan mundurnya Anas Urbaningrum dari ketua umum, partai demokrat berharap tingkat elektabilitas partainya meningkat. Namun, menurut hasil survey yang dilakukan pada tahun 2012 hingga 2014, elektabilitas partai demokrat malah semakin menurun. Menurut survei Center for Strategic dan International Studies (CSIS), elektabilitas partai demokrat pada 6-19 Juli 2012 turun dengan suara 11, 1 persen.²⁷ Pada tahun 2013, menurut survei Lembaga Survei

²⁶Anas Urbaningrum Mundur dari Ketua Umum Partai Demokrat, Sabtu 23 Pebruari 2012, www.bbc.co.uk.

²⁷Elektabilitas Demokrat Malah Terus Menurun, Kamis 9 Agustus 2012, www.suarapembaruan.com.

Indonesia (LSI), elektabilitas partai demokrat kembali turun ke angka 9,8 persen.²⁸ Artinya, dengan hasil tersebut, diprediksi bawah partai demokrat pada pemilu 2014 hanya akan menjadi partai papan tengah dengan elektabilitas dibawah 10 persen.

Alasan menurunnya elektabilitas partai demokrat, selain dikarenakan faktor Anas Urbaningrum dan politisi demokrat lainnya yang tersangkut kasus korupsi, menurut sejumlah pengamat politik, kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang semakin menurun, juga menjadi alasan lain menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai tersebut. Kekhawatiran partai demokrat semakin menjadi-jadi, mereka bingung dengan persoalan elektabilitas partainya yang semakin hari semakin menurun. Akhirnya, dalam upaya penyelamatan Partai Demokrat, dalam kongres luar biasa partai demokrat di Bali, menunjuk Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua umum partai demokrat. Dengan ditunjuknya SBY sebagai ketua umum partai demokrat, diharapkan mampu mengangkat citra partai demokrat yang sedang mengalami ujian berat. Susilo Bambang Yudhoyono dituntut harus mampu mengangkat suara partai demokrat pada pemilu 2014 dan mengembalikannya menjadi partai papan atas.

Turunnya elektabilitas partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ini pada Pemilu 2014 dimanfaatkan oleh pesaing terdekat mereka, yakni partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar. Karena, PDI-P dan Golkar merupakan partai politik papan atas yang selalu berada dalam tiga besar dalam setiap penyelenggaraan Pemilu pasca reformasi. Hal ini terbukti dengan tingginya perolehan PDI-P pada Pemilu 2014 dan disusul oleh Partai

²⁸“LSI: Elektabilitas Partai Demokrat Terus Turun, Demokrat Bakal Jadi Parpol Papan Tengah”, Minggu, 24 November 2013, www.kompas.com.

Golkar. Akibatnya, pada pemilihan presiden tahun 2014, partai demokrat tidak lagi mengusung calon presiden dan bersikap netral dikarenakan syarat yang tidak terpenuhi, yaitu harus meraih suara di atas 20 persen. Walaupun kemungkinan koalisi masih terbuka, tapi SBY nampaknya sudah memprediksi bahwa calon yang diusung partai demokrat yang dipilih berdasarkan hasil konvensi partai demokrat, tidak akan mampu menyaingi suara calon presiden yang lain, terutama calon presiden Joko Widodo pada saat itu.

E. Pemilu 2014 dan Harapan Masyarakat Indonesia

Tahun 2014 disebut sebagai tahunnya politik di Indonesia. Karenanya, tahun ini merupakan tahun momentum pesta demokrasi terbesar yang selalu dilaksanakan 5 tahun sekali di Indonesia, yaitu pemilihan legislatif pada tanggal 9 April dan Pemilihan Presiden pada tanggal 9 Juli mendatang.

Pada tahun 2014 ini berbagai harapan masa depan hadir dalam benak masyarakat Indonesia. Persoalan kesejahteraan, kesenjangan sosial, penurunan angka kemiskinan, pendidikan gratis, akses pelayanan kesehatan yang mudah dan terjangkau, pemberantasan korupsi dan lain sebagainya, diharapkan mampu terlaksana setelah terpilihnya Anggota legislatif dan presiden yang baru, minimal permasalahan tersebut dapat berkurang dengan sistem pemerintahan yang lebih baik. Harapan masa depan yang lebih baik ini semakin melambung ketika hampir semua partai politik peserta Pemilu 2014 menjanjikan apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia melalui media elektronik dan media cetak.

Hasil Pemilihan Umum pada tahun 1999, 2004, dan 2009 menjadi gambaran bagaimana proses pelaksanaan pemilu 2014 berjalan. Berdasarkan hasil pemilu tahun 1999, 2004 dan 2009, sistem

kepartaian yang muncul adalah sistem multipartai yang moderat tapi tidak ada satupun partai yang paling dominan. Berangkat dari ketiga pemilu legislatif di era reformasi tersebut, hasilnya pada pemilihan presiden bervariasi. 1999 dan 2004 contohnya, walaupun partai PDI-P tahun 1999 dan Golkar 2004 memenangkan pemilu legislatif, tapi pada pemilihan presiden, calon presiden dari masing-masing partai tidak ada yang keluar sebagai pemenang. Walaupun Megawati pada tahun 2001 naik menjadi presiden Indonesia, tapi itu lebih disebabkan oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memberhentikan Abdurrahman Wahid dari presiden. Akan tetapi, hasil tersebut berbeda di pemilu 2009, Partai Demokrat yang menang pada pemilu legislatif 2009, berhasil memenangi pemilihan presiden dalam satu putaran dengan calon presiden yang sama, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, dengan suara sebanyak 60,8 persen disusul oleh calon lainnya Megawati sebanyak 26,79 persen dan Yusuf Kalla sebanyak 12,41 persen.²⁹

Memasuki tahun 2013, [Komisi Pemilihan Umum](#) mengumumkan daftar 46 [partai politik](#) yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilu 2014, di mana beberapa partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. 9 partai lainnya merupakan peserta [Pemilu 2009](#) yang berhasil memperoleh suara 3,5 persen suara dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014.³⁰ Setelah di verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum, Partai politik yang lolos terdapat 15 partai politik, tiga diantaranya adalah partai daerah.³¹ Adapun 15 partai politik yang lolos sesuai dengan

²⁹“[Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2009](#)”. Kpu, diakses 26-07-2009

³⁰Undang-Undang No. 8 Tahun 2012

³¹Sesuai dengan MoU Helsinki 2005, Provinsi Aceh boleh mendirikan partai lokal.

nomor urutnya adalah: [1] Partai Nasional Demokrat (Nasdem), [2] Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), [3] Partai Keadilan Sejahtera (PKS), [4] Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), [5] Partai Golongan Karya (Golkar), [6] Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), [7] Partai Demokrat, [8] Partai Amanat Nasional (PAN), [9] Partai Persatuan Pembangunan (PPP), [10] Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), [11] Partai Damai Aceh, [12] Partai Nasional Aceh, [13] Partai Aceh, [14] Partai Bulan Bintang (PBB), dan [15] Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).³²

Dari ke 12 partai politik nasional yang ikut pemilu 2014, yang berhak mencalonkan calonpresiden dari partainya adalah partai politik yang memperoleh suara minimal 25 persen suara nasional partai politik atau gabungan partai politik pada pemilu 2014 atau 20 persen perolehan kursi di parlemen. Artinya, dari jumlah suara yang ditetapkan sesuai dengan Undang Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Presidential Threshold, paling memungkinkan hanya akan ada tiga pasangan calon presiden 2014.

Hasil Pemilu Legislatif pada tahun 1999 dan 2004 yang selalu berbeda dengan hasil pemilihan presiden coba dimanfaatkan oleh beberapa tokoh masyarakat Indonesia, seperti Yusril Ihza Mahendra dan Effendi Ghozali. Yusril Ihza Mahendra melihat bahwa undang undang no 42 tahun 2008 tentang Presidential Threshold tidak sesuai dengan Undang undang Dasar 1945 pasal 22 E.³³Selain itu, jika pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dipisah, berarti dalam lima tahun ada dua kali pemilihan umum, sedangkan dalam undang-undang dasar diatur bahwa pemilihan umum hanya sekali

³² Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/kpts/KPU/Tahun 2013, tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik.

³³ Berdasarkan Pasal 22E UUD 1945, Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

dilakukan dalam lima tahun. Namun, usulan Yusril dan Effendi Ghazali ke Mahkamah Konstitusi tersebut dikabulkan, tetapi berlaku untuk Pemilu tahun 2019. Dengan dikabulkannya pengajuan tersebut, Pemilu 2019 kemungkinan akan dilakukan serentak, baik itu Pemilihan Bupati, Gubernur, Anggota Legislatif, maupun pemilihan Presiden.³⁴

G. Indonesia 2014: Kembalinya PDI-P menjadi Partai Penguasa

Memasuki tahun politik di Indonesia, beberapa lembaga survey telah melakukan survey dan analisa yang menunjukkan bahwa partai politik yang berideologi nasionalis masih memimpin suara dalam pemilihan umum tahun 2014. Partai politik peserta pemilu 2014 yang dipersepsikan publik sebagai partai yang berhaluan nasionalis adalah partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Nasdem dan Partai Keadilan dan Persatuan (PKPI). Partai politik berhaluan nasionalis menurut sejumlah lembaga survei dipandang oleh mayoritas masyarakat Indonesia sebagai partai yang populer, akseptable dan memiliki elektabilitas dimasyarakat.

Tingginya dukungan masyarakat kepada partai berhaluan nasionalis terutama kepada PDI-P dan Partai Demokrat dibandingkan kepada partai-partai yang berhaluan Islam diantaranya dikarenakan figur dari pimpinan partai tersebut. Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono hingga saat ini masih dipercaya sebagai figur yang memiliki daya pikat untuk menarik dukungan masyarakat. Susilo Bambang Yudhoyono. Contohnya. Ketika partai demokrat mengalami masalah, dengan tersangkutnya

³⁴<http://www.antaraneews.com/berita/415567/mk-kabulkan-pemilu-serentak-2019>, diakses pada tanggal 10 Maret 2014

beberapa politisi partai tersebut, khususnya ketika Anas Urbaningrum -Ketua Umum Partai Demokrat- tersangkut kasus korupsi, publik dan kader partai demokrat meminta Susilo Bambang Yudhoyono untuk turun tangan menjadi ketua partai tersebut sebagai tindakan penyelamatan kepada partainya.³⁵

Selama dua tahun berturut-turut, yakni dari tahun 2012 hingga awal 2014, kader partai demokrat selalu terlibat kasus korupsi. Dikarenakan persoalan korupsi yang menimpa sejumlah kader partai demokrat, elektabilitas partai ini semakin hari semakin merosot tajam. Namun, elektabilitas yang terus menurun tersebut tampaknya dapat diperbaiki oleh Susilo Bambang Yudhoyono, apabila dia mampu meyakinkan masyarakat, bahwa partai yang dipimpinnya tersebut anti-korupsi. Dengan tersangkanya beberapa kader demokrat, dapat dijadikan bukti bahwa Susilo Bambang Yudhoyono yang bertindak sebagai presiden tidak akan melindungi kadernya yang melanggar hukum. Apabila kita melihat hasil pemilihan umum legislatif yang dilakukan pada tanggal 9 April 2014 lalu, maka sosok Susilo Bambang Yudhoyono masih menyimpan magnet tersendiri sehingga dapat menolong Partai Demokrat dari keterpurukan. Meskipun sebelumnya partai demokrat diperkirakan akan memperoleh suara dibawah 10 persen, tetapi pada pemilihan umum legislatif 2014 yang lalu partai demokrat mampu meraih suara sebanyak 10,19 persen. Adapun hasil pemilihan umum legislatif tahun 2014 adalah sebagai berikut:

³⁵SBY bersedia jadi Ketua Umum Partai Demokrat, Sabtu 30 Maret 2013, Tempo.co

| No | Partai Politik | Suara | % | Kursi di DPR |
|----|----------------|------------|---------|--------------|
| 01 | Partai Nasdem | 8.402.812 | 6,72 % | 35 |
| 02 | PKB | 11.298.957 | 9,04 % | 47 |
| 03 | PKS | 8.480.204 | 6,79 % | 40 |
| 04 | PDI Perjuangan | 23.681.471 | 18,95 % | 109 |
| 05 | Golkar | 18.432.312 | 14,75 % | 91 |
| 06 | Gerindra | 14.760.371 | 11,81 % | 73 |
| 07 | Demokrat | 12.728.913 | 10,19 % | 61 |
| 08 | PAN | 9.481.621 | 7,57 % | 49 |
| 09 | PPP | 8.157.488 | 6,53 % | 39 |
| 10 | HANURA | 6.579.498 | 5,26 % | 16 |
| 11 | PBB | 1.825.750 | 1,46 % | - |
| 12 | PKPI | 1.143.094 | 0,91 % | - |

Apabila disusun sesuai dengan peroleh terbesar suara hasil Pemilihan Legislatif tahun 2014 maka hasilnya sebagai berikut: [1] PDI-P, [2] Golkar, [3] Gerindra, [4] Partai Demokrat, [5] PKB, [6] PAN, [7] PKS, [8] Partai Nasdem, [9] PPP, [10] Hanura, [11] PBB, dan [12] PKPI.

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa Partai Demokrat pada Pemilu 2014 masih memiliki dukungan kuat di level masyarakat bawah, karena sosok SBY dikenal sebagai sosok presiden yang merakyat dan tetap masih dicintai oleh masyarakat Indonesia. Sementara itu, alasan mengapa Partai Golkar masih memiliki suara kuat didalam setiap pemilihan umum, dikarenakan partai ini merupakan partai tua yang memiliki pengalaman dan manajemen yang baik, ditambah dengan soliditas kader partai golkar yang

merata di tanah air. Banyaknya kader Partai Golkar yang menjadi kepala daerah di seluruh daerah Indonesia, seperti: di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi, menjadi modal penting untuk meraup suara besar pada pemilu 2014. Selain keunggulan yang disebutkan diatas, partai Golkar juga memiliki sosok pemimpin pengusaha yang memiliki media televisi. Kekuatan media televisi yang dimiliki keluarga Abu Rizal Bakrie, yaitu: TV One dan ANTV, tidak ragukan lagi mampu menjaga dan menaikkan citra partai tersebut.

Kecenderungan masyarakat Indonesia yang lebih menyukai figur tertentu untuk menjadi pemimpin, ketimbang melihat platform partai tertentu, membuat partai-partai yang memiliki publik figur selalu mendapatkan suara besar dalam setiap pemilu yang diselenggarakan di Indonesia. Tokoh atau figur yang selama ini dikenal masyarakat, seperti Joko Widodo dan Megawati dari PDI-P, Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat, Prabowo Subianto dari Gerindra, Surya Paloh dari Partai Nasdem, pada pemilu 2014 menjadi faktor yang menentukan dalam Pemilu Legislatif 2014 yang lalu.

Dalam Pilpres yang diselenggarakan pada tanggal 9 April tahun 2014 yang lalu, kemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla atas pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa sebelumnya sudah bisa diprediksi oleh berbagai pengamat politik, karena elektabilitas Joko Widodo hingga menjelang pemilihan presiden tidak tergeserkan oleh calon yang lain. Selain faktor UU yang mengharuskan seorang calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik yang meraih suara 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara secara nasional, faktor elektabilitas Joko Widodo yang begitu tinggi membuat tokoh yang lain sungkan untuk mencalonkan

diri menjadi presiden, sehingga pada Pilpres 2014 yang lalu hanya menghasilkan dua calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Bila dicermati, kemenangan Joko Widodo dalam Pilpres 2014 tidak ubahnya sebuah “pukulan telak” bagi tokoh nasional lainnya ditengah apatisme masyarakat terhadap perilaku pemimpin yang selama ini dianggap feodal, menyibukkan diri dengan kepentingan diri sendiri dan kelompoknya, serta cenderung mengedepankan arogansi kekuasaan. Joko Widodo dalam kurun dua tahun saja, semenjak dirinya terpilih menjadi Gubernur Jakarta, namanya melejit di pentas perpolitikan nasional. Kondisi ini kemudian melahirkan harapan, bahwa Indonesia bisa dipimpin oleh seorang presiden yang tidak hanya mampu mengucapkan janji, tapi bisa merealisasikan janji tersebut.

Jokowi dianggap berhasil membangun relasi saling percaya antar pemimpin dan masyarakatnya. Perasaan positif ini kemudian menjadi semacam resonansi yang menggerakkan masyarakat bukan saja menerima namun juga turut memenangkannya dalam pemilihan presiden tahun 2014. Model pendekatan yang digunakan oleh Jokowi dan tim sukses pemenangan Jokowi ini merupakan sebuah terobosan baru untuk meretas kemapanan perilaku elit politik selama ini yang hanya mengedepankan kepentingan dirinya dan kelompoknya.

Kemenangan pasangan Jokowi pada pemilihan Gubernur Jakarta menjadi sebuah indikator bahwa masyarakat Indonesia merindukan pemimpin yang berempati, yaitu pemimpin yang mampu menyelami perasaan rakyatnya, dan mampu memenuhi keinginan rakyatnya. Situasi tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa masyarakat sudah muak terhadap tatanan feodalistik dan korup. Masyarakat tidak bisa lagi dibohongi melalui pencitraan tapi justru jauh dari kenyataan

Selain faktor di atas, terpilihnya Jokowi menjadi presiden ketujuh merupakan jawaban dari masyarakat bahwa masyarakat tidak butuh lagi spanduk dan slogan-slogan lainnya yang menyatakan dirinya cerdas, pintar atau lain sebagainya yang justru menunjukkan kesombongannya, tapi justru sebaliknya masyarakat Indonesia lebih senang kepada sosok yang biasa-biasa saja yang tidak suka menunjukkan kelebihannya tetapi kelebihan dan kinerjanya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Adapun sembilan program prioritas pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah sebagai berikut:³⁶

1. Meningkatkan profesionalisme, menaikkan gaji, dan kesejahteraan PNS, TNI dan Polri secara bertahap selama 5 tahun. Program remunerasi PNS akan dituntaskan di tingkat pusat dan diperluas sampai ke level daerah.
2. Mensejahterakan desa dengan mengalokasikan dana desa di mana setiap desa rata-rata Rp 1,4 miliar dalam bentuk program bantuan khusus dan menjadikan Perangkat Desa menjadi PNS secara bertahap.
3. Meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan termasuk memberi subsidi Rp 1 juta setiap bulannya untuk keluarga pra-sejahtera, sepanjang pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 7%
4. Pendirian Bank Petani dan UMKM serta penguatan Bulog serta perbaikan irigasi sawah

³⁶ 9 Program Nyata Jokowi-JK Bila Terpilih Pada Pilpres 2014, liputan6.com, diakses pada tanggal 10 September 2014.

5. Perbaiki 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan membangun pusat pelelangan, penyimpanan dan pengelolaan ikan.
6. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun. Bantuan dana Rp 10 juta per tahun untuk UMKM/Koperasi. Mendorong, memperkuat dan mempromosikan industri kreatif dan digital sebagai salah satu upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.
7. Layanan kesehatan gratis rawat jalan/rawat inap dengan Kartu Indonesia Sehat, 6.000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap serta air bersih untuk seluruh rakyat.
8. Membantu meningkatkan mutu pendidikan pesantren guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Meningkatkan kesejahteraan guru-guru pesantren sebagai bagian dari komponen pendidik bangsa.
9. Mewujudkan pendidikan bagi seluruh warga negara termasuk petani, nelayan, buruh, termasuk difabel dan elemen masyarakat lain melalui Kartu Indonesia Pintar. Menyediakan fasilitas pendidikan yang baik dengan target partisipasi 100% untuk SD, dan 95% untuk tingkat SLTP; mewujudkan kurikulum berkualitas; menjamin kesejahteraan guru dan meningkatkan tunjangan bagi para guru. Meningkatkan kualitas guru dengan melanjutkan program Sertifikasi guru.

Sembilan program realistis yang ditawarkan Jokowi kepada masyarakat Indonesia setelah terpilihnya dia menjadi presiden ketujuh RI sangat dinantikan realisasinya oleh masyarakat Indonesia. Dikarenakan Indonesia membutuhkan percepat ekonomi sehingga

memiliki daya saing yang tinggi terhadap negara-negara lain. Menurut Jokowi, Karena Globalisasi merupakan realitas kehidupan, maka antara kebijakan ekonomi dan pasar bebas harus sejalan dengan arus globalisasi. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Thomas L. Friedman dalam bukunya *The World Is Flat* berdikari dan kemandirian ekonomi, tidak boleh mengabaikan globalisasi dan pasar bebas, karena adaptasi dalam globalisasi dapat menopang suatu perekonomian bangsa.

Naik turunnya perolehan suara suatu partai politik menunjukkan bahwa partai politik belum mewakili kepentingan rakyat banyak. Selain soal apatisme masyarakat terhadap kinerja partai politik selama ini. Apalagi kemudian diperburuk pelbagai skandal korupsi. Munculnya partai politik baru seperti PKPI dan PBB pada Pemilu 2014, tidak membawa perubahan signifikan sebagaimana yang dikehendaki masyarakat. Kecuali partai Nasdem yang berhasil meraih suara sebanyak 6,72 persen atau 35 kursi anggota DPR diprediksi dapat bersaing dengan partai lama sebab partai Nasdem mendapat dukungan media massa yang aktif mensosialisasikan eksistensi partainya di televisi.

H. Peluang Partai Politik Islam pasca Pemilu 2014

Tahun 2014 menjadi pertarungan partai politik Islam dalam menarik simpati masyarakat. Dalam sejarah Pemilu Indonesia, partai politik Islam yang pernah memperoleh suara yang cukup berarti dalam perpolitikan Indonesia adalah partai Masyumi dengan menguasai 20,9 persen suara dan menang di 10 dari 15 daerah pemilihan, termasuk [Jakarta Raya](#), [Jawa Barat](#), [Sumatera Selatan](#), [Sumatera Barat](#), [Sumatera Utara](#), [Kalimantan Barat](#), [Kalimantan Selatan](#), [Sulawesi Tenggara Selatan](#), dan [Maluku](#).

Perjalanan politik Masyumi, sejak didirikan pada tanggal 7 Nopember 1945 sampai dibubarkan pada tahun 1960, penuh dengan dinamika, baik di dalam internal Masyumi sendiri maupun ketika berhubungan dengan partai politik dan Presiden Sukarno. Hubungan Masyumi dengan Presiden Sukarno yang pernah mengalami hubungan yang harmonis, terutama pada masa revolusi juga pernah mengalami pergeseran hingga menjurus kepada konflik. Konflik antara Sukarno dengan Masyumi semakin tajam, terutama sejak adanya keinginan Sukarno mengubur partai politik pada bulan Oktober 1956, dan Konsepsi Presiden pada tahun 1957.

Konflik Masyumi dengan Presiden Sukarno ditenggarai disebabkan beberapa hal. *Pertama*, masalah kedudukan dan kekuasaan dalam pemerintahan. Kedudukan dan kekuasaan Masyumi dalam pemerintahan sangat besar pada masa Demokrasi Parlementer, sementara pengaruh dan kekuasaan Presiden Sukarno sangat kecil. Mengingat kedudukan seperti itu, maka Presiden Sukarno ingin merebut kedudukan itu, dan terlibat secara langsung dalam pemerintahan. Sebab *kedua*, adanya perbedaan yang prinsipil mengenai demokrasi. Sukarno menginginkan Demokrasi Terpimpin, sementara Masyumi menolak dan menentang Demokrasi Terpimpin. Sebab *ketiga*, adanya perbedaan ideologi. Presiden Sukarno menggalang kerjasama dengan PKI yang berhaluan komunis. Sementara itu, Partai Masyumi mempunyai ideologi Islam yang tidak mau bekerjasama dengan PKI, dan sangat keras menentang komunisme.³⁷

³⁷Insan Fahmi Siregar, "Partai Masyumi: Pembentukan, Perkembangan, dan Pembubarannya 1945-1960", *Thesis*, Pdf. Diambil dari <http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=72069&lokasi=lokal>, 2003.

Usaha Sukarno untuk menyingkirkan Masyumi dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan politik, dengan cara mengurangi dan menghilangkan peran politik Masyumi dalam pemerintahan dan legislatif. Kedua, pendekatan hukum, dengan membuat beberapa peraturan yang menjurus kepada pembubaran Partai Masyumi. Pada tahun 1960, partai Masyumi akhirnya resmi dibubarkan oleh presiden Soekarno dikarenakan tokoh-tokohnya dicurigai terlibat dalam gerakan pemberontakan terhadap pemerintah.

Pada Pemilu tahun 1999, setelah tumbang rezim Suharto, partai-partai politik Islam mulai bermunculan, termasuk juga partai bulan bintang yang mengatasnamakan bahwa partai bulan bintang lahir dibidani oleh orang-orang Masyumi. Salah satu faktor bermunculannya partai politik Islam adalah lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik di Era Presiden B.J. Habibie. Dari 48 partai politik peserta Pemilu 1999, delapan di antaranya adalah partai politik Islam.

Hasil Pemilu tahun 1999, menunjukkan bahwa perolehan partai politik Islam sangatlah kecil jika dibandingkan dengan perolehan suara partai politik yang berideologikan nasionalis. Partai Persatuan Pembangunan yang telah berumur 40 tahun lebih,³⁸ hanya memperoleh 58 kursi DPR atau 12,6 persen dari 462 kursi yang diperebutkan di DPR. Partai Bulan Bintang memperoleh 13 kursi atau 2,8 persen, Partai Keadilan memperoleh 7 kursi atau 1,5 persen. Partai Nahdlatul Ummah memperoleh 5 kursi atau 1,1 persen, serta 3 partai Islam lainnya hanya memperoleh 1 kursi masing-masing, yaitu

³⁸Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah sebuah [partai politik](#) di [Indonesia](#). Pada saat pendeklarasiannya tanggal [5 Januari 1973](#) partai ini merupakan hasil gabungan dari empat partai keagamaan yaitu [Partai Nahdlatul Ulama](#) (NU), [Partai Serikat Islam Indonesia](#) (PSII), [Pert](#) dan [Parmusi](#)

Partai Kebangkitan Ummat, Partai Syarikat Islam serta Partai Masyumi sehingga berjumlah 3 kursi atau 0,64 persen.

Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional yang berbasiskan massa Islam, memperoleh kursi yang juga tidak begitu besar, yaitu memperoleh 51 kursi atau 11 persen dan Partai Amanat Nasional memperoleh 34 kursi atau 7,36 persen. Sehingga secara keseluruhan, total perolehan kursi partai Islam dan partai berbasis massa Islam pada pemilu 1999 adalah 171 kursi atau sekitar 38 persen.

Perbedaan suara partai politik Islam pada pemilu 1955 yang meraih suara keseluruhan 45,13 persen dan Pemilu tahun 1999 sebesar 18,6 persen, maka dapat dikatakan bahwa dukungan pemilih terhadap partai politik Islam dalam pemilu tahun 1999 mulai berkurang. Walaupun hasil perolehan suara partai politik Islam dan partai politik berbasis massa Islam pada Pemilu 1999 digabungkan, hasilnya tetap menurun, yaitu sekitar 8,13 persen suara berkurang.

Hasil gemilang partai politik Islam pada Pemilu 1955 di mana hampir mendapatkan 46 persen suara, sulit terulang lagi dalam pemilu di era reformasi, karena banyaknya perubahan dan pergeseran yang dialami partai politik Islam pada masa masa rezim Suharto. Hal itu dikarenakan Suharto pernah memberlakukan pemaksaan terhadap ideologi Pancasila sebagai Ideologi tunggal pada tahun 1984. Pada gilirannya, partai-partai politik Islam mulai pecah dan berbeda pendapat terhadap gagasan tersebut. Sebagian kalangan Islam ada yang menerima, dan sebagiannya banyak yang menolak. Akibatnya, orang-orang muslim banyak yang apatis terhadap pemilihan.

Disisi lain, kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada Pemilu 1999 dan 2014, menunjukkan bahwa

partai ini berhasil mengambil simpati masyarakat setelah sebelumnya partai ini mendapat tekanan yang sangat kuat dari pemerintahan Suharto. Pada tahun 1993, Suharto melihat bahwa Megawati merupakan ancaman masa depan bagi kekuasaannya. Megawati yang terpilih sebagai ketua Partai Demokrasi Indonesia dalam kongres di Surabaya tahun 1993, dipaksa untuk melepaskan jabatannya oleh Suharto. Namun, pada era reformasi, pada tahun 1998 Megawati mendirikan partai politik tandingan, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memenangkan pemilu tahun 1999.

Secara keseluruhan, dari total 24 partai politik yang menjadi peserta pada Pemilu 2004, ada tujuh partai politik Islam dan partai berbasis massa Islam yang ikut dalam pemilihan umum. Tujuh partai politik tersebut adalah:³⁹

| No | Partai | Suara | % | Kursi di DPR |
|----|---------------------------------|------------|------|--------------|
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 11.989.564 | 10,6 | 52 |
| 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 9.248.764 | 8,2 | 58 |
| 3 | Partai Keadilan Sejahtera | 8.325.020 | 7,3 | 45 |
| 4 | Partai Amanat Nasional | 7.303.324 | 6,4 | 53 |
| 5 | Partai Bulan Bintang | 2.970.487 | 2,6 | 11 |
| 6 | Partai Bintang Reformasi | 2.764.998 | 2,4 | 14 |
| 7 | Partai Nahdhatul Umat Indonesia | 895.610 | 0,8 | 2 |

³⁹Rekapitulasi suara, Komisi Pemilihan Umum Indonesia, tahun 2004

Apabila jumlah tersebut ditotal secara keseluruhan, maka perolehan suara partai politik Islam dan partai politik berbasis massa Islam pada pemilihan umum 2004 adalah sekitar 38 persen suara. Pada pemilu 2004, Partai Keadilan Sejahtera yang sebelumnya pada pemilu 1999 tidak begitu mendapatkan suara yang cukup signifikan, namun pada pemilu kali ini, masuk kedalam partai politik Islam yang cukup diperhitungkan dengan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat sebanyak 45 kursi. Hal ini mengindikasikan bahwa Partai Keadilan Sejahtera bisa menjadi representasi dari keinginan masyarakat, yang ingin melihat partai politik Islam yang santun dan bersih.

Sementara itu, pada Pemilu tahun 2009, terdapat sembilan partai politik Islam dan partai politik berbasis massa Islam. Hasilnya adalah, hanya empat partai politik Islam dan partai politik berbasis masa Islam yang berhasil merebut kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Yang menarik untuk dicermati adalah, grafik perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada pemilu 1999, perolehan suara Partai Keadilan sebanyak 1,4 persen atau 7 kursi.

Pada pemilihan umum 2004 grafik perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera semakin meningkat menjadi 7,3 persen atau 45 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Pada pemilu tahun 2009, perolehan Partai Keadilan Sejahtera sedikit meningkat menjadi 7,88 persen atau 57 kursi dari 560 kursi yang diperebutkan di Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun perolehan suara partai politik Islam dan berbasis massa Islam pada pemilu tahun 2009 adalah sebagai berikut:⁴⁰

⁴⁰Komisi Pemilihan Umum Indonesia, tahun 2009

| No | Partai | Suara | % | Kursi di DPR |
|----|------------------------------|-----------|------|--------------|
| 1 | Partai Keadilan Sejahtera | 8.206.955 | 7,88 | 57 |
| 2 | Partai Amanat Nasional | 6.254.580 | 6,01 | 46 |
| 3 | Partai Persatuan Pembangunan | 5.533.214 | 5,32 | 37 |
| 4 | Partai Kebangkitan Bangsa | 5.146.122 | 4,94 | 28 |

Melihat perjalanan Pemilu ke Pemilu yang diikuti oleh partai politik Islam dan berbasis massa Islam dari tahun 1955 sampai dengan tahun 2014, hanya pada tahun 1955 partai politik Islam yang mendapatkan hasil yang sangat signifikan, yaitu Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) yang memperoleh suara sebanyak 20,9 persen. Apabila peroleh suara Partai Masyumi dan Nahdhatul Ulama pada tahun 1955 digabungkan, maka perolehan kedua partai Islam tersebut melebihi perolehan suara dari tujuh partai politik Islam yang ikut dalam pemilu 2004. Artinya, dari 100 persen pemilih yang ikut pemilihan umum di Indonesia, dari tahun 1955 hingga 2004, sekitar 37 hingga 45 persen dari pemilih tersebut memilih partai Islam dan sisanya sekitar 55 persen memilih partai non-Islam.⁴¹

Namun, pada Pemilu tahun 2009, suara pemilih partai Islam yang sekitar 38 persen tersebut turun menjadi 24 persen suara. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku pemilih pada tahun 2009 sudah

⁴¹Hasil Pemilihan Umum 1955 jumlah suara partai politik Islam secara keseluruhan adalah 45,13 % sedangkan pada pemilihan umum tahun 1999 adalah sekitar 38 persen suara. Lihat *www.kpu.go.id*.

semakin berubah atau dengan kata lain, pemilih Indonesia tidak lagi begitu melihat kepada suatu ideologi partai, walaupun masih ada, tapi jumlah itu sedikit. Pemilih lebih cenderung melihat apakah partai tersebut bersih dari praktik korupsi dan dapat membawa Indonesia ke arah lebih baik atau tidak? Selain itu, faktor figur pimpinan partai, seperti Megawati di PDI-P dan Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat, menjadi alasan kuat mengapa masyarakat memilih partai tersebut.

Pada pemilihan umum tahun 2014, perolehan suara partai-partai berhaluan Islam ternyata justru lebih menyedihkan. Hanya Partai Kebangkitan Bangsa yang mampu meraih suara signifikan yaitu 9,04 persen atau 47 kursi anggota DPR. hal ini dikarenakan berbagai alasan. Alasan yang pertama adalah partai Islam yang paling dominan dalam pemilu 2009 adalah Partai Keadilan Sejahtera. Namun Partai Keadilan Sejahtera yang selalu mengkampanyekan partai Islam yang bersih ini menjelang pemilu 2014 dirundung masalah korupsi, hal ini yang membuat pemilih mulai meninggalkan partai Islam. Yang kedua adalah, adanya tokoh partai politik Islam yang menjadi pejabat publik hidup dalam keadaan mewah, seperti memiliki aset di berbagai daerah di Indonesia dan selain itu mereka memiliki istri lebih dari satu. Secara kasat mata, perilaku seperti itu akan membuat masyarakat antipati terhadap partai Islam, apalagi masyarakat Indonesia nampaknya tidak begitu suka dengan poligami, khususnya kepada mereka yang menjadi pejabat publik yang digaji dari pajak rakyat.

Adapun hasil perolehan suara partai politik berideologikan Islam yang ikut dalam pemilu 2014 adalah sebagai berikut :

| No | Nama Partai | % | Kursi di DPR |
|----|-------------|--------|--------------|
| 1 | PKB | 9,04 % | 47 |
| 2 | PKS | 6,79 % | 40 |
| 3 | PAN | 7,57 % | 49 |
| 4 | PPP | 6,53 % | 39 |
| 5 | PBB | 1,46 % | - |

Dari 560 kursi yang tersedia di Dewan Perwakilan Rakyat, Partai politik berideologikan Islam hanya meraih sebanyak 175 kursi anggota DPR. Apabila dibandingkan dengan raihan kursi partai politik berideologikan nasionalis, maka kursi itu masih sangat jauh. Kecilnya perolehan suara partai yang berideologikan Islam pada pemilu tahun 2014 sebenarnya bisa diatasi apabila partai-partai Islam yang lain mulai berbenah dan mencari figur yang lebih akseptable masyarakat, sehingga menurunnya perolehan kursi Partai Keadilan Sejahtera bisa dimanfaatkan oleh partai politik Islam yang lainnya. Partai Keadilan Sejahtera yang pada tahun 2009 lalu memperoleh kursi sebanyak 57, pada pemilu tahun 2014 ini hanya memperoleh 40 kursi.⁴²

Sedikitnya perolehan kursi Partai politik berideologikan Islam pada tahun 2014 harus dapat direbut kembali pada pemilu 2019. Jika tidak, maka partai politik Islam akan semakin ditinggalkan oleh para pemilihnya. Namun satu hal yang terpenting adalah bagaimana partai-partai Islam menyiapkan seorang pemimpin yang kharismatik dan akseptable dan perbuatannya sesuai dengan tuntunan Alqur'an dan sunnah Rasulullah SAW, selain juga management yang baik, sehingga mampu membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim,

⁴²Media Center KPU (24 Juli 2009) berdasarkan Hasil Rekapitulasi Nasional Pilpres 2009 (22-23 Juli 2009).

maka peluang untuk merebut hati pemilih dari kalangan muslim tetaplah terbuka lebar bagi partai politik berideologikan Islam.

I. Simpulan

Pasca pemilu legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden 2014, masyarakat Indonesia berharap bahwa pemerintahan yang terbentuk adalah dari orang-orang yang terbaik yang peduli terhadap masa depan kehidupan masyarakat Indonesia. Keinginan ini tentunya bisa menjadi kenyataan apabila presiden terpilih Joko Widodo dapat merealisasikan janji-janji politiknya selama kampanye pemilihan presiden kemarin. Partai PDI P yang dalam kurun waktu 10 tahun selalu berada diluar pemerintahan pada pemilu 2014 ini mendapatkan hasil yang manis dengan terpilihnya kader dari PDI P sebagai presiden ketujuh Republik Indonesia selain juga menjadi partai pemenang pada pemilihan umum legislatif 2014 yang lalu. Sikap konsistensi PDI P yang mengambil sikap oposisi diluar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun, juga dikarenakan faktor kader PDI P yang menjadi pemimpin di berbagai daerah seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Tri Rismaharini wali kota Surabaya dan Joko Widodo yang terpilih sebagai Gubernur Jakarta yang semuanya mendapatkan penilaian positif dari masyarakat tentunya menjadi salah satu alasan kuat bahwa PDI-P adalah partai bersih yang pro rakyat, sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat dalam memimpin bangsa Indonesia di tahun 2014.

Selain alasan di atas, faktor Joko Widodo yang ditetapkan oleh PDI-P sebagai Calon Presiden 2014, juga merupakan faktor penting meningkatnya suara partai tersebut pada pileg 2014. Setelah terpilihnya Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta, nama Joko

Widodo semakin melejit di tingkat nasional. Bahkan dalam berbagai survei penyaringan calon presiden, elektabilitas Gubernur DKI tersebut dari tahun 2013 hingga 2014, tidak ada satupun tokoh nasional yang mampu menyainginya.

Dengan terpilihnya Joko Widodo menjadi Presiden RI ketujuh pada pilpres 2014 kemaren, mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia menginginkan pemimpin yang biasa biasa saja, tapi berkerja secara nyata dan dapat dirasakan hasilnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun, satu hal yang menarik, kalahnya Prabowo Subianto pada pilpres 2014 yang lalu menyisakan pertanyaan yang penting, apakah koalisi yang dibangun oleh Prabowo dan kawan-kawan dapat mengontrol kebijakan Jokowi atau hanya justru mereka berusaha mencari-cari kesalahan dan menggulingkan Jokowi dari kursi Presiden.

Koalisi Indonesia hebat yang dimotori oleh Jokowi sepenuhnya belum merepresentasikan parlemen yang kuat di DPR, sehingga dalam setiap kebijakannya Jokowi harus ekstra waspadakarena suaranya lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak mendukung Jokowi. Karena apabila salah, bukan tidak mungkin anggota DPR akan memakzulkan Jokowi dari kursi presiden seperti apa yang terjadi pada masa KH. Abdurrahman Wahid. Namun, Jokowi masih memiliki peluang besar untuk menata bangsa Indonesia menuju bangsa yang sejahtera dan bermartabat dengan merealisasikan program-programnya yang pro rakyat dan pro pembangunan, tetapi disamping itu juga dia harus merangkul partai-partai politik yang ada dalam Koalisi Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo Subianto untuk lebih memperkuat kekuatan Jokowi di parlemen. Hal itu memungkinkan, karena dua sampai tiga partai politik tertarik untuk bergabung bersama Jokowi dalam

Koalisi Indonesia Hebat.

Peluang partai politik Islam seperti partai Kebangkitan Bangsa yang sempat mengejutkan beberapa lembaga survei, pada pemilu 2014 yang lalu memperoleh suara yang cukup besar, pada pemilu yang akan datang diharapkan tetap terjaga suaranya bahkan diharapkan lebih meningkat seperti yang pernah dilakukan partai masyumi pada awal-awal kemerdekaan Indonesia dengan catatan selalu memperhatikan aspirasi masyarakat bawah. Artinya, walaupun pada pemilihan legislatif 2014 yang lalu tidak ada satupun partai politik Islam yang meraih suara besar atau tiga besar, tetapi partai politik Islam masih bisa menjadi penyeimbang pemerintah untuk selalu mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Selain itu pula, partai politik harus bersih dari kader-kadernya yang melakukan praktik korupsi. Apabila ini dilakukan, maka pada pemilu tahun 2019 kemungkinan partai politik Islam dapat meraih suara yang signifikan.

Koalisi poros tengah atau koalisi partai Islam yang berhasil mengantarkan Amin Rais dari Partai Amanat Nasional menjadi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Abdurrahman Wahid sebagai presiden Indonesia ke-4 pada tahun 1999, membuktikan bahwa Partai Islam di Indonesia masih menyimpan kekuatan untuk memenangkan pemilihan presiden. Karena bagaimanapun agama Islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh 85 persen penduduk Indonesia.

Daftar Pustaka

- Asyari, Suaidi. *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah*, Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Barton, Greg. *The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Jakarta: LKiS, 2002.
- Chandra, Siddharth and Douglas Kammen. "Generating Reforms and Reforming Generations: Military Politics in Indonesia's Transition to Democracy." *World Politics*, Vol. 55, No. 1 (2002).
- Conceicao, J.F. *Indonesia's Six Years of Living Dangerously*. Singapore: Horizon Books, 2005.
- Habibie, Bacharuddin Jusuf. *Detik-Detik yang Menentukan*. Jakarta: THC Mandiri, 2006.
- Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Paska Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2008*. Jakarta: Serambi, 2008.
- Suryadinata, Leo. *Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2002.
- Zainuddin, HM. *Jokowi, dari Jualan Kursi hingga Dua Kali Mendapatkan Kursi*. Jakarta: Ufuk Press, 2012.
- Insan Fahmi Siregar. "Partai Masyumi: Pembentukan, Perkembangan, dan Pembubarannya, 1945-1960", *Thesis*. UI, 2003. Pdf.

Website

“Anas Resmi Tersangka Kasus Suap”, Jum’at 22 Pebruari 2012,
www.tempo.com.

“Angelina Dimasukkan ke Rumah Tahanan KPK”, 28 April 2012,
kompas.com.

“KPK Tetapkan Andi Mallarangeng Tersangka Hambalang”, Kamis
6 Desember 2012, *www.kompas.com.*

“LSI: Elektabilitas Partai Demokrat Terus Turun, Demokrat Bakal
Jadi Parpol Papan Tengah”, Minggu 24 November 2013,
www.kompas.com.

“PDI Perjuangan Partai Politik Elektabilitas Tertinggi per Februari
2014”, Minggu 16 Maret 2014, *Tribunnews.com.*

“SBY Bersedia jadi Ketua Umum Partai Demokrat”, Sabtu 30 Maret
2013, *Tempo.com.*